



# LAPORAN TAHUNAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI TAHUN 2015



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2015**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Dasar Hukum	.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM	.....	5
2.1 Visi Misi	.....	5
2.2 Organisasi	.....	6
2.3 Tupoksi	.....	7
2.4 Dukungan Sumber Daya	.....	20
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	.....	28
3.1 Program unggulan	.....	28
3.2 Kegiatan masing- masing bidang	.....	30
3.2.1 Sekretariat	.....	30
3.2.2 Pengkajian dan Pengembangan	.....	31
3.2.3 Binus	.....	38
3.2.4 BLK	.....	44
3.2.5 Bina UMKM	.....	59
3.2.6 UPT Diklat	.....	60
3.3 Kendala dan Hambatan	.....	66
3.4 Solusi	.....	67
BAB IV PENUTUP	.....	68
4.1 Simpulan	.....	68
4.2 Saran	.....	68

## KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti angayubagya kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya maka laporan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2013 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2013 mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2008-2013 yang mencakup Program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Laporan tahunan ini merupakan wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM di Provinsi Bali.

Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan berbagai informasi sekaligus sebagai bahan evaluasi dari program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di masa mendatang.

Denpasar, Januari 2015  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI BALI

**IDEWA NYOMAN PATRA, SH.MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580115 198603 1 018

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Koperasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, program/kegiatan serta dukungan anggaran baik dari APBD maupun APBN. Berbagai macam program/kegiatan telah dijalankan selama kurun waktu tahun 2014. Berbagai kendala dan hambatan telah dilalui dalam menjalankan pembinaan terhadap Koperasi maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi binaan. Tentu tidak terlepas dengan kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali.

Dengan adanya perubahan undang-undang nomor 22 tahun 1999 ke undang-undang nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Keputusan Gubernur Bali No. 35 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2005 dan Keputusan Gubernur Nomor 35 tahun 2001 maka struktur Dinas Koperasi menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

## 1.2. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- d. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- e. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- f. Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- h. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2000-2005
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, maka Setruktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- j. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang Rencana Strategik tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2008-2013
- k. Peraturan Gubernur Nomor 69 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- l. Peraturan Gubernur Nomor 92 tahun 2011 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit pelaksana Teknis

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu disusun tujuan dan sasaran sebagai penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu ditetapkan tujuan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan:
  - a. Terwujudnya Usaha Ekonomi Kerakyatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM)
  - b. Terwujudnya Kemitraan dalam Dunia Usaha
2. Sasaran:
  - a. Meningkatkan Usaha Ekonomi Kerakyatan
  - b. Meningkatkan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan Pengusaha Besar dan BUMN/BUMD

#### **PENJELASAN SASARAN:**

- a. Meningkatnya Usaha Ekonomi Kerakyatan

Usaha Ekonomi Kerakyatan yang diharapkan ke depan adalah Usaha yang sebagian besar dikelola masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok, wadah koperasi maupun Usaha Kecil dengan mengurangi system konglomerasi, sehingga lapangan Usaha dapat diwujudkan secara merata dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta menanggulangi adanya kesengajaan social

- b. Meningkatkan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi dengan Pengusaha Besar, BUMD dan BUMN

Kemitraan Usaha bertujuan untuk menumbuhkan sruktur dunia Usaha yang lebih kokoh dan efisien, sehingga dapat menguasai dan mengembangkan pasar sekaligus meningkatkan daya saing baik pasar lokal, regional maupun global. Tumbuh dan meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah Koperasi ditentukan:

1. Adanya keterkaitan usaha yang saling menguntungkan
2. Berkembang dan mantapnya jaringan usaha
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan/kebijakan tentang kemitraan

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Visi Misi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Bali

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013-2018 yang mengacu pada Perda Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali menetapkan *Visi* dan *Misi* sebagai berikut :

*VISI* : ”Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah menuju Bali Mandara”.

Dari *Visi* tersebut Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menetapkan *MISI* sebagai berikut :

1. Menumbuhkan Kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
2. Mewujudkan Koperasi yang

Dalam rangka mewujudkan *Visi* dan *Misi* tersebut perlu didukung oleh nilai-nilai dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi :

1. Kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan Negara, Jujur dan Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



2. Jalinan kemitraan, konsultatif dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk mengoptimalkan kinerja.
3. Disiplin, taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan akuntabilitas.
4. Kualitas SDM yang kompetitif

## **2.2. Organisasi**

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengeluarkan Perda Nomor 2 tahun 2005 mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 69 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali maka susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan Keputusan Gubernur Nomor 92 tahun 2011 tentang Organisasi dan Rincian tugas pokok Unit Teknis di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi subag :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum
  - b. Kepala Sub Bgian Kepegawaian
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, meliputi seksi :
  - a. Kepala Seksi Pengembangan

- b. Kepala Seksi Data dan Pengkajian
  - c. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Bina Lembaga Koperasi (BLK), meliputi seksi :
- a. Kepala Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum
  - b. Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana
  - c. Kepala Seksi Pengawasan
5. Bidang Bina Usaha Koperasi (BINUS), meliputi seksi :
- a. Kepala Seksi Aneka Usaha
  - b. Kepala Seksi Simpan Pinjam
  - c. Kepala Seksi Permodalan
6. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meliputi seksi :
- a. Kepala Seksi Kelembagaan
  - b. Kepala Seksi Usaha
  - c. Kepala Seksi Pembiayaan
7. UPT Diklat
- a. Kepala UPT
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kepala Seksi Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
  - d. Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat
8. Jabatan Fungsional, meliputi :
- a. Widyaswara
  - b. Pustakawan
  - c. Arsiparis
  - d. Humas

### **2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Bali**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 69 tahun 2011 tentang rincian tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **2.3.1. Kepala Dinas mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja dinas;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. Merumuskan kebijakan umum dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Menyediakan dukungan dan fasilitas pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, kerjasama antar Kabupaten/Kota maupun instansi terkait;
- g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
- h. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- k. Melaksanakan system pengendalian intern;

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**2.3.2. Sekretaris mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian;
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;
- g. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun;
- h. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan dan Penyusunan Program dan Urusan Umum;
- i. Mengkoordinasi dan menghimpun rencana kerja dan program pembangunan bidang KUMKM;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan humas dan keprotokolan;
- k. Melaksanakan system pengendalian intern;

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

**2.3.2.1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Nilai prestasi kerja bawahan;
- d. Membuat konsep usulan pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, gaji berkala, penghargaan dan usul kepegawaian lainnya;
- e. Membuat, menghimpun dan memelihara DUK (Daftar Urutan Kepangkatan);
- f. Membuat rekapitulasi dan melaporkan absensi kepegawaian secara periodik;
- g. Menata dan menyimpan berkas kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- i. Melaksanakan system pengendalian intern;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

**2.3.2.2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum;

- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menata arus barang dan menyiapkan bahan usulan penghapusan barang;
- e. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga barang bergerak dan tidak bergerak;
- f. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor serta memelihara sarana dan prasarana;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan barang milik daerah;
- h. Menyelenggarakan surat menyurat;
- i. Menyelenggarakan urusan keprotokolan;
- j. Melaksanakan system penilaian intern;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

**2.3.2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan
- c. Menilai prestasi kerja bawahan
- d. Mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan keuangan
- e. Melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya
- f. Melaksanakan control keuangan

- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan
- h. Menghimpun data dalam rangka penyiapan dan penyusunan draf rencana kerja dan anggaran dinas
- i. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan
- j. Melaksanakan system pengendalian intern
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris

**2.3.3. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- f. Melakukan pengkajian teknis dan menyusun rencana pengembangan bidang KUMKM;
- g. Menghimpun, mentabulasi, dan mengkaji data KUMKM;
- h. Menyiapkan bahan-bahan informasi dan pertimbangan teknis bidang KUMKM;

- i. Mengidentifikasi masalah dan merumuskan kebijakan di bidang KUMKM;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengkajian dan pengembangan di bidang KUMKM;
- k. Menyusun rencana pengembangan di bidang KUMKM;
- l. Menyusun RENSTRA, LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan Dinas dan LPPD;
- m. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka pengembangan, pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data KUMKM;
- n. Membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang KUMKM;
- o. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**2.3.3.1. Kepala Seksi Data dan Pengkajian mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Mengumpulkan, menyusun, mengolah dan mengkaji data KUMKM;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun buku informasi KUMKM;
- f. Menyusun rencana pengkajian di bidang KUMKM;



- g. Menyusun indicator kinerja utama (IKU) Dinas;
- h. Melaksanakan system pengendalian intern ;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

**2.3.3.2. Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun rencana pengembangan di bidang KUMKM;
- e. Melakukan pengembangan program dan kegiatan pembangunan bidang UMKM;
- f. Melakukan pengembangan system dan prosedur di bidang KUMKM;
- g. Melaksanakan sosialisasi pengembangan di bidang KUMKM;
- h. Menghimpun bahan kebijakan sebagai bahan dalam penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis);
- i. Melaksanakan system pengendalian intern;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

**2.3.3.3. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Dinas secara periodik;
- e. Menghimpun dan mengolah data untuk bahan laporan tahunan dinas;
- f. Menghimpun bahan dan penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD;
- g. Membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. Menyiapkan penyusunan laporan kinerja dinas;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

**2.3.4. Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. Mengkordinasikan para kepala seksi;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Membimbing dan member petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan;

- f. Menyusun petunjuk operasional pembinaan kelembagaan koperasi;
- g. Melakukan sosialisasi/penyuluhan perkoperasian proses pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi dan izin usaha koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi lintas kabupaten/kota;
- h. Menghimpun bahan kebijakan sebagai bahan dalam penyusunan standar pelayanan minimal (SPM);
- i. Melakukan penilaian bidang kelembagaan koperasi;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi;
- k. Melaksanakan system pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### **2.3.4.1. Kepala Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum mempunyai**

##### **tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyiapkan bahan sosialisasi/penyuluhan perkoperasian;
- e. Membantu proses pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi izin usaha koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi lintas Kabupaten/kota;
- f. Memberikan fasilitasi konsultasi hukum;

- g. Menghimpun bahan kebijakan sebagai bahan dalam penyusunan standar pelayanan minimal (SPM);
- h. Melaksanakan system pengendalian intern;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

**2.3.4.2. Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyipkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis;
- e. Merumuskan pembinaan, administrasi organisasi, tatalaksana dan manajemen serta kerjasama antar koperasi;
- f. Melakukan inventarisasi perkembangan koperasi;
- g. Melakukan penilaian koperasi berprestasi dan peningkatan koperasi berkualitas;
- h. Melaksanakan system pengendalian intern;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

**2.3.4.3. Kepala Seksi Pengawasan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyipkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis;
- e. Memberikan pembinaan mengenai system pengendalian intern (SPI) koperasi;
- f. Melakukan pengawasan terhadap koperasi lintas kabupaten/ kota;
- g. Membimbing pengawas koperasi menerapkan prinsip akuntabilitas;
- h. Melaksanakan system pengendalian intern;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

**2.3.5. Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Dinas;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;

- f. Menyusun petunjuk operasional penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / usaha simpan pinjam koperasi;
- g. Menyusun petunjuk operasional permodelan koperasi;
- h. Memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan kredit koperasi;
- i. Mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- j. Melakukan koordinasi pengembangan jaringan usaha koperasi dan promosi produk unggulan koperasi;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**2.3.5.1. Kepala Seksi Aneka Usaha Koperasi mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyiapkan petunjuk teknis;
- e. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan usaha koperasi dan promosi produk unggulan koperasi;
- f. Memfasilitasi kemitraan usaha koperasi;
- g. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **2.3.5.2. Kepala Seksi Simpan Pinjam Koperasi mempunyai**

##### **tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi;
- e. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### **2.3.5.3. Kepala Seksi Permodalan Koperasi mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Membantu menyusun petunjuk operasional permodalan koperasi;
- e. Memberikan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan kredit koperasi;
- f. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

**2.3.6. Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga konsultasi, pemasaran, kemitraan dan jaringan distribusi;
- g. Mengembangkan program memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- h. Memfasilitasi penyebaran informasi pasar;
- i. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana usaha;
- j. Menyusun petunjuk teknis dan memfasilitasi penyediaan pembiayaan usaha;
- k. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait, dunia usaha dan lembaga masyarakat;
- l. Melaksanakan system pengendalian intern;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan



- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**2.3.6.1. Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Membantu memfasilitasi pengembangan lembaga konsultasi, pemasaran, kemitraan dan jaringan distribusi;
- e. Menyiapkan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis kerjasama usaha;
- f. Menyiapkan dan memfasilitasi penyebaran informasi pasar, promosi dan teknologi;
- g. Melaksanakan system pengendalian intern;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

**2.3.6.2. Kepala Seksi Usaha mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menghimpun, menganalisa dan pengelola data;
- e. Mengkoordinasikan penyediaan prasarana umum;
- f. Membantu menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis;

- g. Pemberian bimbingan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang usaha;
- h. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

**2.3.6.3. Kepala Seksi Pembiayaan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi;
- e. Menyebarkan informasi pembiayaan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- f. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kemampuan pemupukan modal sendiri, menyusun studi kelayakan, dan manajemen keuangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. Menyiapkan petunjuk teknis dan memfasilitasi penyediaan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

**2.3.7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, UMKM mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian dan Seksi;
- c. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- f. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
- g. Menyusun usulan program dan kegiatan UPT;
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. Melakukan kerjasama dengan gerakan koperasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan instansi terkait;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**2.3.7.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana dan program kerja SubBagian;

- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Mengelola urusan surat menyurat;
- e. Membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan kepegawaian;
- f. Mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang;
- g. Memelihara gedung, perlengkapan kantor dan sarana prasarana;
- h. Mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

**2.3.7.2. Kepala Seksi Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:**

- i. Menyusun rencana kegiatan Seksi;
- ii. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- iii. Menilai prestasi kerja bawahan;
- iv. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat;
- v. Menghimpun dan menyusun rencana kerja UPT;
- vi. Menyusun rencana kegiatan anggaran UPT;
- vii. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- viii. Menyusun laporan kinerja dan kegiatan UPT;
- ix. Melaksanakan sistem pengendalian intern;

- x. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- xi. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

### **2.3.7.3. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

#### **mempunyai tugas:**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi;
2. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. Menilai prestasi kerja bawahan;
4. Menyusun pedoman kerja dan petunjuk teknis;
5. Meniapkan dan melaksanakan administrasi penyelenggaraan diklat;
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
7. Menyusun kurikulum dan silabus;
8. Mengkoordinasikan dan menyiapkan instruktur;
9. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## **2.4. Dukungan Sumber Daya**

### **2.4.1. Dukungan Personil**

Jumlah Pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali posisi 31 Desember 2014 adalah sebanyak 69 orang. Dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

## 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok sebagai berikut :

### 1) Berdasarkan Golongan:

- Golongan IV sebanyak : 15 orang
- Golongan III sebanyak : 40 orang
- Golongan II sebanyak : 14 orang
- Golongan I sebanyak : -

### 2) Berdasarkan Jabatan:

#### a. Jabatan Struktural:

- Eselon II sebanyak : 1 orang
- Eselon III sebanyak : 6 orang
- Eselon IV sebanyak : 15 orang

#### b. Jabatan Fungsional:

- Arsiparis sebanyak : 1 orang
- Pustakawan sebanyak : 1 orang
- Widyaiswara sebanyak : 3 orang
- Pranata Humas sebanyak : 1 orang

### 3) Berdasarkan Pendidikan:

- S2 sebanyak : 12 orang
- S1 sebanyak : 30 orang
- Diploma : 3 orang
- SLTA sebanyak : 24 orang

- SLTP sebanyak : -

- SD sebanyak : -

4) Berdasarkan Diklat Penjurangan:

- Diklatpim II sebanyak : 1 orang

- Diklatpm III sebanyak : 8 orang

- Diklatpim IV sebanyak : 18 orang

5) Berdasarkan Jenis Kelamin:

- Laki-laki sebanyak : 36 orang

- Perempuan sebanyak : 32 orang

6) Berdasarkan Agama:

- Agama Hindu sebanyak : 61 orang

- Agama Islam sebanyak : 5 orang

- Agama Kristen sebanyak : 2 orang

- Agama Budha sebanyak : -

7) Lain-lain:

a. Kenaikan pangkat tahun 2014 :

- Periode April sebanyak : 7 orang

- Periode Oktober sebanyak : 2 orang

b. Kenaikan gaji berkala : 33 orang

c. Pensiun sebanyak : 2 orang (meninggal dunia)

**3. Pegawai Non PNS**

a. Satpam : 2 orang

b. Penjaga malam : 5 orang

c. PPKL : 7 orang

- d. ODS : 5 orang
- e. Klinik : 3 orang
- f. *Cleaning Service* : 3 orang
- g. Sopir : 5 orang

#### **2.4.2. Dukungan Sarana dan Prasarana**

Untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Bali perlu adanya dukungan prasarana dan sarana yang memadai. Setelah melalui proses pemeriksaan oleh badan pemeriksa Bali, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain:

##### 1. Fisik

- Tanah : 6.530 m<sup>2</sup>
- Bangunan Gedung : 10 unit
- Kendaraan Operasional/Dinas :
  - Mobil : 10 Unit
  - Motor : 50 Unit
- Alat-alat Kerja :
  - Meja kerja : 194 buah
  - Kursi kerja : 95 buah
  - Komputer : 58 unit
  - Printer : 12 unit
  - Filling Kabinet : 20 unit
  - Rak kaca/kayu : 38 unit
  - Air Conditioner (AC) : 34 unit



- Alat kantor lainnya : 592 unit
- Zice : 10 set

## 2. Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang dimiliki sebanyak 8 unit, dengan type B/120 M<sup>2</sup> sebanyak 1 unit dan type C/70 M<sup>2</sup> sebanyak 7 unit. Adapun lokasi rumah dinas tersebut ada di Banjar Penyaringan Renon, Denpasar dan Jalan Tegal Wangi, Panjer, Denpasar.

### 2.4.3. Dukungan Anggaran

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun anggaran 2013 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran baik dari APBD maupun APBN sebesar Rp. 11.511.615.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- APBD sebesar Rp. 6.437.172.000.- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp.94,86%
- Dekon sebesar Rp. 5.074.443.000.- realisasi fisik 100% dan keuangan 94,24% serta

Adapun alokasi anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

#### **ANGGARAN APBD TAHUN 2014**

#### **DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI BALI**

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Bidang
----	---------	----------	----------	--------

1.	Pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat menyurat</li> <li>- Sumd.Air listrik</li> <li>- ATK</li> <li>- Barang Cetakan</li> <li>- Instalasi listrik</li> <li>- Bh bacaan</li> <li>- Makan Minum</li> <li>- Rakor dan konsultasi</li> <li>- Upacara keagamaan</li> </ul>	<p>1.778.000</p> <p>243.000.000</p> <p>41.898.945</p> <p>9.688.000</p> <p>10.143.500</p> <p>14.652.000</p> <p>27.121.000</p> <p>157.303.510</p> <p>50.000.000</p>	Sekretariat
2.	Pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat menyurat</li> <li>- Sumberdaya air dan listrik</li> <li>- ATK</li> <li>- Barang cetakan</li> <li>- Instalasi listrik</li> <li>- Bahan bacaan dan Peraturan perundang2an</li> <li>- Makan minum rapat</li> <li>- Upacara keagamaan</li> </ul>	<p>1.200.000</p> <p>25.200.000</p> <p>9.710.000</p> <p>2.400.000</p> <p>8.936.000</p> <p>1.200.000</p> <p>7.440.000</p> <p>15.000.000</p>	UPT
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlengkapan Gdng Kantor</li> <li>- Peralatan Gedung</li> <li>- Pemeliharaan rutin Gedung</li> <li>- Pemeliharaan Kendaraan</li> <li>- Pmliharaan peralatan kantor</li> </ul>	<p>80.000.000</p> <p>116.897.000</p> <p>258.300.000</p> <p>421.136.045</p> <p>18.999.500</p>	Sekretariat
No	Program	Kegiatan	Anggaran	Bidang
4.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlengkapan gedung</li> <li>- Pemeliharaan Gedung</li> <li>- Pemeliharaan rutin kendaraan dinas</li> <li>- Pengadaan peralatan gdg</li> </ul>	<p>128.086.000</p> <p>129.916.000</p> <p>64.195.000</p> <p>13.750.000</p>	UPT
5.	Penciptaan iklim UKM yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan koordinasi dan pengembangan UKM</li> <li>- Fasilitasi pengembangan</li> </ul>	<p>78.328.500</p> <p>1.757.695.000</p>	UKM UKM

		UKM		
6.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM</li> <li>- Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi</li> <li>- Pelatihan manajemen pengelolaan bagi calon Kop baru</li> </ul>	<p>186.675.000</p> <p>168.333.500</p> <p>332.488.000</p>	<p>UKM</p> <p>Binus</p> <p>UPT</p>
7.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan</li> <li>- Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM</li> <li>- Penyelenggaraan promosi produk UKM</li> </ul>	<p>107.905.700</p> <p>135.648.300</p> <p>476.786.500</p>	<p>Binus</p> <p>Binus</p> <p>UKM</p>
8.	Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pemb.Koperasi</li> <li>- Pemb.sistem informasi perencanaan pengembangan Kop</li> <li>- Pembinaan pengawasan dan penghargaan Kop. Berprestasi</li> </ul>	<p>352.755.000</p> <p>107.650.500</p> <p>462.778.000</p>	<p>BLK</p> <p>Pengkajian</p> <p>BLK</p>
No	Program	Kegiatan	Anggaran	Bidang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UK</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan</li> <li>- Koord.Sosialisasi GEMASKOP</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TKPKD</li> </ul>	<p>30.981.000</p> <p>102.769.500</p> <p>200.695.000</p> <p>77.732.000</p>	<p>Pengkajian</p> <p>Pengkajian</p> <p>BLK</p> <p>Pengkajian</p>

		melalui pemberdayaan KUKM		
--	--	------------------------------	--	--

**ANGGARAN APBN (Dekonsentrasi) TAHUN 2014**

**DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI BALI**

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	5.074.443.000	Kegiatan tersebar dimasing-masing Bidang, UPT Diklat maupun di Sekretariat

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1. PROGRAM UNGGULAN**

3.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- a. Penyedia jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- g. Penyediaan makanan dan minuman
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
- i. Upacara keagamaan

3.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan Peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

3.1.3. Program Penciptaan Iklim Usaha usaha Keci Menengah yang Kondusif

- a. Perencanaan koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
- b. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah

3.1.4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

UKM

- a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- b. Fasilitasi pengembangan jaringan /kemitraan usaha dan promosi produk unggulan koperasi.

3.1.5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Fasilitasi/sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan /pembiayaan dan sarana prasarana bagi koperasi
- b. Pemantauan pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
- c. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.

3.1.6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
- b. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
- c. Pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi
- d. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- f. Koordinasi, sosialisasi gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)
- g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TKPKD melalui pemberdayaan KUKM.
- h. Revitalisasi Koperasi.

## **3.2. KEGIATAN-KEGIATAN MASING-MASING SEKRETARIS DAN BIDANG**

### **3.2.1. SEKRETARIAT**

Bagian kesekretariatan memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat dijabarkan kedalam sub bagian-sub bagian sebagai berikut :

#### **a. Sub Bagian Umum**

##### **1. Surat menyurat**

Pada tahun 2015 surat menyurat yang dikelola pada bagian umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdiri dari, surat masuk sebanyak 2.876 Surat, surat keluar sebanyak 1.435 surat. Dalam pengarsipan telah menggunakan pola yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sesuai petunjuk Badan Arsip Daerah.

##### **2. Pemeliharaan gedung kantor baik kebersihan ruangan, kamar mandi, maupun kebun atau taman dengan memanfaatkan tenaga klening service maupun tukang kebun.**

##### **3. Menyiapkan kendaraan dinas atau mobil dinas yang dikerjakan oleh para sopir sehingga mobil siap beroperasi.**

#### **b. Sub Bagian Kepegawaian**

Kegiatan pada sub bagian kepegawaian adalah

- Mengurus kenaikan pangkat pegawai
- Mengurus pengusulan pensiun
- Mebuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- Usulan gaji berkala

- Usulan mutasi
- Menyiapkan absensi
- Pengusulan penghargaan satya lencana
- Kegiatan Kepegawaian lainnya.

**c. Sub Bagian Keuangan dan Program**

Dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ada dua anggaran yang dikelola yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Jumlah dana yang dikelola dari kedua sumber tersebut adalah RP. 33.117.780.359.- terdiri dari :

- APBD : Rp. 18.486.251.359-
- APBN : Rp. 14.631.529.000,-

**3.2.2. BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengkajian dan Pengembangan dibantu oleh Seksi Pengembangan, Seksi Data dan Pengkajian, serta Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

**a. Seksi Pengembangan**

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp. 43.000.000.- realisasi keuangan Rp. 40.563.100 (94,33%) dan realisasi fisik 100%. Dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TKPKD melalui Pemberdayaan KUKM, dengan dana sebesar Rp. 77.732.000.-



realisasi keuangan Rp. 70.654.400( 90,89%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Kegiatan Temu Usaha di bidang permodalan, dan pemasaran.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng pihak BUMN ( BTDC) sebagai penyandang modal dan PT. Tiara Dewata sebagai pemberi informasi pemasaran. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 (delapan) Kabupaten. Tiga Kabupaten merupakan daerah yang mendapat program OVOP dari Kementerian Koperasi, UKM RI dengan dibantu oleh Taiwan Technical Mission (TTM) yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan.

- Kegiatan penanggulangan kemiskinan

Kegiatan ini dilaksanakan di daerah-daerah kantong miskin yang meliputi 4 (empat) Kabupaten seperti Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung. Adapun jenis kegiatan ini dengan membentuk tim penanggulangan kemiskinan yang meliputi pihak perbankan, BUMN, instansi terkait, serta unsur Diskop, UMKM Provinsi Bali. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk mengevaluasi bantuan permodalan yang pernah diberikan oleh pihak perbankan maupun BUMN terhadap perkembangan usaha yang dikelola oleh para UKM di daerah tersebut.

## **b. Seksi Data dan Pengkajian**

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian dengan jumlah dana sebesar Rp. 195.631500.- realisasi keuangan sebesar Rp. 181.450.100.- ( 92,75%) dan realisasi fisik sebesar (100%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

➤ **Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Data Koperasi dan UMKM**

Bekerjasama dengan pihak ketiga, menyajikan informasi mengenai perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi binaan. Dalam aplikasi tersebut tersimpan database koperasi dan UMKM binaan sehingga apabila data mengenai koperasi dan UMKM binaan tersebut diperlukan dapat segera ditampilkan.

➤ **Buku Data informasi KUKM**

Menyajikan data keragaan koperasi dari masing-masing Kabupaten/Kota maupun Nivo Provinsi, Data Keragaan KUD, Data Keragaan Non KUD, Data Keragaan KUMKM, maupun Data berdasarkan kelompok usaha.

**c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan jumlah dana sebesar Rp. 102.769.500.- realisasi keuangan Rp. 97.047.600 ( 94,43%) dan realisasi fisik (100%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Monitoring, evaluasi bantuan perkuatan KUKM.
- Monitoring, evaluasi perkembangan peserta diklat
- Monitoring, evaluasi perkembangan RAT Koperasi
- Monitoring, evaluasi perkembangan peserta pameran
- Monitoring, evaluasi perkembangan kesehatan KSP/USP
- Monitoring, evaluasi perkembangan peserta sosialisasi peningkatan sumberdaya UKM bidang permodalan dan pesaran.

Untuk kegiatan yang bersumber dari anggaran Dekonsentrasi dengan jumlah anggaran yang dikelola Bidang Pengkajian dan Pengembangan Rp. 196.055.000.- dengan kegiatan antara lain :

a. Rapat koordinasi dan rekonsiliasi data koperasi dan UMKM

Penyelenggaraan rapat dengan narasumber dari Kementerian Koperasi, UKM RI dengan peserta dari para UKM binaan dengan topik bahasan

- Kebijakan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Bali.
- Pendataan koperasi melalui aplikasi online data system (ODS)
- Manfaat Sertifikat Koperasi/Nomor Induk koperasi.

.Rintisan Agribisnis Bagi Pembina Pengelola KUKM ke Bandung Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2015 kegiatan ini dilaksanakan dengan mengajak para petani rintisan agribisnis ke Bandung Provinsi Jawa Barat, karena Provinsi Bali memiliki Koperasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan koperasi di Bandung Provinsi Jawa Barat. Hasil dari kegiatan ini diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan hasil kunjungannya kepada para anggota lain sehingga pengetahuan dan keterampilan selama

mengikuti transplantasi dapat diterapkan di Koperasi maupun wilayahnya masing-masing.

**b. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KUKM**

Kegiatan Monitoring dan evaluasi pemberdayaan KUKM adalah kegiatan Dekonsentrasi yang pelaksanaan kegiatannya memintoring bantuan social Kementerian Koperasi dan UKM RI dari tahun 2010 s/d 2015 yang diberikan kepada Koperasi dan UKM untuk memperkuat permasalahan permodalan, pemasaran maupun fisik bangunan.

**3.2.3. BIDANG BINA USAHA KOPERASI**

Bina usaha koperasi merupakan salah satu bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali, mempunyai 2 program dan 3 kegiatan. Sasaran dan hasil pembinaan usaha koperasi dapat dilihat pada kegiatan masing-masing seksi sebagai berikut :

**a. Seksi Aneka Usaha**

Seksi Aneka Usaha melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Jaringan /kemitraan usaha dan Promosi Produk unggulan koperasi. Capaian realisasi fisiknya 100% sedangkan realisasi keuangannya mencapai 88,76% dari anggaran yg diterima Rp. 168.333.500,- terealisasi sebesar Rp. 149.412.200,-. Kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa promosi produk unggulan Koperasi/anggota koperasi bagi 4 unit Koperasi/anggota Koperasi.

**b. Seksi Simpan Pinjam**

Seksi Simpan Pinjam melaksanakan kegiatan Pemantauan Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 135.648.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 128.712.550,- atau sekitar 94,89%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi Nivo Provinsi dengan target 40 KSP/USP-Koperasi terealisasi 100%.
- Pendataan KSP/USP-Koperasi Nivo Provinsi dengan target 40 KSP/USP-Koperasi terealisasi 100%.
- Monitoring pemanfaatan batuan sarana prasarana pemerintah dengan target 55 Koperasi terealisasi 100%.

**c. Seksi Permodalan**

Seksi Permodalan melaksanakan kegiatan Fasilitasi/Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan/pembiayaan dan sarana prasarana bagi koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 107.905.700,- terealisasi Rp. 103.244.175,- atau sekitar 95,68%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Sosialisasi Program Perkuatan Permodalan Koperasi terhadap 60 koperasi terealisasi 100%.
- Penilaian Kinerja Koperasi penerima program pembiayaan dengan target 30 koperasi terealisasi 100%.
- Monitoring koperasi penerima program bantuan sosial/hibah terhadap 30 koperasi terealisasi 100%.

- Sosialisasi Perkoperasian bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan target 40 Gapoktan terealisasi 100%.

#### **3.2.4. BIDANG BINA LEMBAGA KOPERASI**

Program kerja Bina Lembaga Koperasi melalui program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang didukung melalui pendanaan dari anggaran APBD Tahun 2015 melalui kegiatan :

1. Seksi Pengawasan mempunyai Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi melaksanakan kegiatan Revitalisasi Koperasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 130.773.400.- realisasi keuangan Rr. 113.878.000.- (87,08%) dengan kegiatan :
  - a. Inventarisasi pendataan koperasi tidak aktif
  - b. Rapat revitalisasi koperasi
  - c. Bintek pengawas koperasi
  - d. Study komperatif ke Provinsi Jawa Timur.
2. Seksi Organisasi dan Tata Laksana mempunyai Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi melaksanakan kegiatan Pembinaan, dan penghargaan koperasi berprestasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 350.015.000.- realisasi keuangan Rp. 317.453.100 (90,70%) dengan kegiatan:
  - a. Rapat koordinasi program kelembagaan koperasi.
  - b. Penilaian tokoh koperasi
  - c. Penilaian koperasi berprestasi
  - d. Monev dan pelaksanaan RAT

- e. Audisi Koperasi siswa se Bali
- f. Bulan Rat
- g. Study Komperatif ke Jogyaakarta

➤ Penilaian tokoh koperasi

Dalam rangka memotivasi dan meningkatkan peran serta aparat dan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang secara kontinyu/secara terus menerus aktif dalam memajukan koperasi diberikan tanda penghargaan atau tanda jasa. Tanda penghargaan dan tanda jasa terdiri dari :

- Tanda penghargaan atau tanda jasa Satya Lencana Pembangunan
- Tanda penghargaan atau tanda jasa Satya Lencana Wira Karya
- Tanda penghargaan atau tanda jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2015 yang diusulkan untuk memperoleh tanda penghargaan/ jasa dan berhasil memperoleh penghargaan dimaksud terlihat sesuai tabel berikut :

**TOKOH KOPERASI  
TAHUN 2015**

No	Yang diusulkan		Penerima Tanda Penghargaan	Ket
	Nama	Jabatan		

1.	Ni Putu Eka Wiryastuti, SE.	Bupati Tabanan	Bakti Koperasi dan UKM	Dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
2.	I Dewa Nyoman Patra, SH.MH	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali.	Satyalancana Pembangunan	Dari Presiden RI
3.	Drs. Ngakan Made Nata	Ketua Koppas Srinadi	Satyalancana Wira Karya	Dari Presiden RI
4.	Ketut Saban, SE	Ketua KSU Sardula	Bakti Koperasi dan UKM	Dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
5.	Nyoman Kerta Jaya, SE.MM	Ketua KUD Pedungan.	Bakti Koperasi dan UKM	Dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

➤ **Penilaian Koperasi Berprestasi.**

Dalam rangka peringatan Hari Koperasi, yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, selalu mengadakan Lomba Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional. Untuk usulan Koperasi berprestasi ketingkat Nasional sebelumnya diadakan Penilaian



Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Bali. Hasil penilaian koperasi berprestasi di Provinsi Bali diusulkan untuk mendapatkan peringkat koperasi berprestasi tingkat nasional.

Untuk tahun 2015 telah dilaksanakan penilaian koperasi berprestasi tingkat provinsi Bali untuk 4 kelompok/jenis koperasi yaitu :

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Jasa
4. Koperasi Produsen

Melalui dukungan anggaran APBD tahun 2013 bagi koperasi berprestasi Provinsi Bali tahun 2013 diberikan bantuan hadiah untuk perkuatan usaha sebesar Rp.90.000.000 ,- sebagaimana tabel dan rincian sebagai berikut :

#### KOPERASI BERPRESTASI PROVINSI BALI TAHUN 2015

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		TEMPAT KEDUDUKAN	RANGKING	HADIAH
		NOMOR	TANGGAL			
1	2	3	4	5	6	7
I 1.	KOPERASI SIMPAN PINJAM Koperasi Kredit Kubu Gunung	02/BH/KDK.22.7 /X/1998	10 Oktober 1998	<i>Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.</i>	I	Piagam dan Uang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
2.	Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Dewata	34/BH/PERIND AGKOP/XII/2004	31 Desember 2004	<i>Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar</i>	II	Piagam dan Uang Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

II	KOPERASI KONSUMEN					
1.	Koperasi Pegawai Negeri Werdhi Yasa	76/BH/PAD/KW K.22/III/1996	25 Maret 1996	<i>Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.</i>	I	Piagam dan U Rp.10.000.000 (Sepu Juta Rupiah)
2.	Koperasi Serba Usaha Kharisma Madani	02/BH/PAD/XX VII/V/2011	12 Mei 2011	<i>Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.</i>	II	Piagam dan U Rp.7.500.000 (Tu Juta Lima Ratus R Rupiah)
3.	Primkoppolresta Denpasar	09/BH/PAD/DIS KOP/X/2002	1 Oktober 2002	<i>Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.</i>	III	Piagam dan U Rp.5.000.000 (Lima Rupiah)
III	KOPERASI JASA					
1.	Koperasi Pegawai Telkom Singaraja	187/BH/PAD/K WK.22/III/1996	27 Pebruari 1996	<i>Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.</i>	I	Piagam dan U Rp.10.000.000 (Sepu Juta Rupiah)
2.	Koperasi Jasa Perjalanan Pariwisata Bali	76/BH/PAD/KW K.22/III/1996	25 Maret 1996	<i>Desa Renon, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar</i>	II	Piagam dan U Rp.7.500.000 (Tu Juta Lima Ratus R Rupiah)
3.	Koperasi Tani Arsa Winangun	14/BH/XXVII.2/ 2009	6 Nopember 2009	<i>Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.</i>	III	Piagam dan U Rp.5.000.000 (Lima Rupiah)
IV	KOPERASI PRODUSEN					
1.	Koperasi Unit	16/BH/XXVII.8/	30 Juni 2011	<i>Desa Beringkit,</i>	I	Piagam dan U

	Desa Beringkit	2011			<i>Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.</i>		Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
2.	Koperasi Unit Desa Artha Wiguna	141/BH/PAD/K WK.22/III/1996	26 Maret 1996		<i>Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.</i>	II	Piagam dan U Rp.7.500.000 (Tu Juta Lima Ratus R Rupiah)
3.	Koperasi Unit Desa Amertha Buana	392/BH/PAD/K WK.22/III/1996	29 Maret 1996		<i>Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.</i>	III	Piagam dan U Rp.5.000.000 (Lima Rupiah)

3. Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum, dalam menjalankan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Koordinasi, sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 224.223.000.- realisasi keuangan Rp. 206.212.700 (91,97%) dengan kegiatan :
- a. Publikasi perkoperasian melalui iklan layanan media elektronik/TV
  - b. Pencetakan undang-undang tentang perkoperasian, perda dan pergub
  - c. Study komperatif ke Provinsi Jawa Tengah.

Bagi koperasi berprestasi tingkat Provinsi Bali tahun 2015 melalui anggaran APBN 2015 juga diberikan kesempatan untuk mengikuti transplantasi/study banding peningkatan Kualitas Kelembagaan ke Semarang pada tanggal 21 s/d 24 September 2015.

## 1. Kegiatan masing-masing seksi

### a. Seksi penyuluhan dan Badan Hukum Koperasi

- Penyuluhan Perkoperasian

Penyuluhan perkoperasian dilaksanakan untuk memberikan pemahaman perkoperasian dikalangan kelompok ekonomi produktif maupun masyarakat luas yang ingin mendirikan koperasi. Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 17 kali penyuluhan perkoperasian.

- Pemberian Badan Hukum Koperasi

Pra koperasi dari kelompok ekonomi produktif yang telah memenuhi persyaratan dan kelayakan diberikan status Badan Hukum Koperasi. Pada tahun 2015 telah disahkan 12 (dua belas) Akta Pendirian Koperasi Nivo Provinsi dan disahkan 2 (dua) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi oleh Gubernur Bali.

Adapun koperasi baru yang telah terbentuk pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

#### **Pemberian Badan Hukum Koperasi Baru.**

No	NAMA KOPERASI	NOMOR BADAN HUKUM/TANGGAL	ALAMAT
1.	KSP Wyas Mertadana	01/BH/XXVIII/2015 23 Maret 2015	Jl. Danau Batur, gg Batan Celagi Blok V No 5 Badung
2.	KSP Kerti Sedana Sejahtera	02/BH/XXVII/III/2015 23 Maret 2015	Jl. Tukad Banyusari gg XII No 20 Lingkungan Tegal sari Kota Denpasar.

3.	KSP Artha Dharma Santi	03/BH/XXVII/III/ 2015 23 Maret 2015	Jl. Tibe Kauh, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Gianyar
4.	KSP Garbha Santi	04/BH/XXVII/III/2015 23 Maret 2015	Jl. Plawa No. 37 Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur
5.	KSP Bali Property Indonesia	05/BH/XXVII/IV/2015 23 April 2015	Jl. Gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Lestari, Desa Padang Sambian
6.	Koperasi Amertha Sedana Yoga	06/BH/XXVII/IX/2015 04 September 2015	Jl. PB. Sudirman, Kampus Fakultas Ekonomi UNUD
7.	KOPDIT Sedana Padang	07/BH/XXVII/VII/2015 3 Nopember 2015	Perum Padang Asri, Desa Padang Sambian Kelod, Denbar
8.	KSP Cahaya Bumi Jatayu	08/BH/XXVII/XI/2015 3 Nopember 2015	Jl. Dewata Sidakarya nomor 40, Sidakarya
9.	KSP. Cendekia Praja Bhakti	09/BH/XXVII/XI/2015 3 Nopember 2015	Jl. Raya Padang Luwih No. 9 X, Dalung Kuta Utara, Badung
10.	Koperasi Simpan Pinjam Gunung Sari	10/BH/XXVII/XI/2013 12 Nopember 2013	Jalan Batuyang , Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
11.	KSP Dewandaru Sejahtera	11/BH/XXVII/XI/2013 12 Nopember 2013	Jl.Singosari Nomor 46 E Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
12.	KSP. Restu Kencana	12/BH/XVII/XII/2013 9 Desember 2013	Jl.Dipta Nomor 15, Banjar Sangging Gianyar.
13.	Koperasi Jasa	13/BH/XXVII/XII/2013	Jalan Antasura No. 15 A

	Karya Guna Dharma	9 Desember 2013	Denpasar Utara
14.	KSP Werdhi Artha Murthi	14/BH/XXVII/XII/2013 9 Desember 2013	Jl. Gunung Guntur 11B Kelurahan Padangsembian Denpasar Barat.

### Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

No	NAMA KOPERASI	NOMOR BADAN HUKUM/TANGGAL	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.	Koperasi Produsen Bali Taru Dewata	04/BH/XXVII/XI/2013 18 Nopember 2013	Jl. Seruni No. 29 Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara.
5.	KSP Tunjung Emas	05/BH/XXVII/XI/2013 9 Desember 2013	Jl. Puputan, Pasar Lama Blok B Lt.II/6 Semarapura Klod Kangin, Klungkung
6.	KSP Sari Permata Niaga	06/BH/XXVII/XII/2013 9 Desember 2013	Jl. Gunung Sanghyang No. 124 Denpasar

## b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

- Keragaan Koperasi

Kondisi kelembagaan koperasi di Bali pada akhir 2015 secara kuantitatif dapat dilihat seperti data terlampir.

Perkembangan koperasi dari tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan baik dalam jumlah koperasi, anggota, volume usaha dan peningkatan asset serta modal sendiri. Jumlah pertumbuhan koperasi rata-rata 3,10 % per tahun yaitu tahun 2012 sebanyak 4.514 koperasi, dan tahun 2013 sebanyak 4.654 koperasi, jumlah anggota koperasi naik rata-rata 2,80 % per tahun yaitu tahun 2012 sebanyak 843.287 orang dan tahun 2013 sebanyak 866.858 orang; jumlah volume usaha koperasi naik rata-rata 10,08% per tahun yaitu tahun 2012 sebesar Rp. 5.177.256.643.425,- dan tahun 2013 sebesar Rp. 5.699.063.951.980,- Asset koperasi naik rata-rata 14,78 % per tahun yaitu tahun 2012 sebesar Rp. 4.971.120.967.485,- dan tahun 2013 sebesar Rp. 5.705.843.950.553,- dan Modal sendiri naik rata-rata 8,79% per tahun, tahun 2012 sebesar Rp. 1.450.493.511.821,- dan tahun 2013 sebesar Rp. 1.577.949.242.403,-

Adapun perkembangan keragaan koperasi tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dapat terlihat seperti tabel berikut.

### **PERKEMBANGAN KERAGAAN KOPERASI TAHUN 2013 DAN 2012**

No	Uraian	Satuan	Tahun		Perkembangan	
			Des 2012	Des 2013	Absolut	%
1.	Jumlah Koperasi	Buah	4.514	4.654	140	3,10
	A. Aktif	Buah	4.066	4.202	136	3,34
	B. Tidak Aktif	Buah	448	452	4	0,89
2.	Jumlah Anggota	Orang	843.287	866.858	23.571	2,80
3.	Modal Sendiri	Rp. Jt.	1.450.493	1.577.949	127.456	8,79
4.	Modal Luar	Rp. Jt.	3.384.779	3.738.270	353.491	10,44
5.	Volume Usaha	Rp. Jt.	5.177.256	5.699.063	521.807	10,08
6.	SHU	Rp. Jt.	167.321	181.562	14.241	8,51
7.	Asset	Rp. Jt.	4.971.120	5.705.843	734.723	14,78
8.	Manajer	Orang	1.227	1.358	131	10,68
9.	Karyawan	Orang	18.813	20.244	1.431	7,61
10.	RAT	Buah	2.493	2.520	27	1,08

Catatan : Dihitung dari tahun yang bersangkutan.

- Pemingkatan Koperasi.

Untuk mengetahui sosok koperasi berkualitas, sebagai badan usaha, sebagai kumpulan orang dan sebagai akselerasi pembangunan dilakukan penilaian secara komprehensif melalui penilaian pemingkatan oleh lembaga independen. Untuk dana APBD Provinsi Bali Tahun 2013 telah dialokasikan anggaran untuk



pemeringkatan 95 koperasi yang dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia.

Adapun hasil pemeringkatan terhadap 95 koperasi yang didukung APBD Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- Sangat Berkwalitas : 1
- Berkualitas : 63
- Cukup berkualitas : 30
- Kurang Berkualitas : 1

## **2. Seksi Pengawasan**

Dalam tahun 2013 telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa koperasi yang tidak aktif termasuk koperasi yang bermasalah.

Terhadap koperasi yang tidak aktif telah dilakukan pembinaan dengan cara mengundang pengurus dan pengawas untuk memberikan pembinaan terhadap koperasi dengan memberikan solusi:

- a. Bagi yang memungkinkan untuk diaktifkan agar segera melakukan aktifitas usaha koperasi;
- b. Bila tidak memungkinkan untuk diaktifkan kembali, supaya melakukan amalgamasi/penggabungan dengan koperasi sejenis;
- c. Tetapi bila kedua hal tersebut tidak memungkinkan disarankan supaya membubarkan diri;

Terhadap koperasi yang tidak aktif telah dilakukan langkah untuk pembubaran oleh Pemerintah dengan lebih awal mengumumkan diberbagai tempat dan instansi terkait. Koperasi yang telah diumumkan adalah sebagai berikut:

1. KJUB Karya Samia, Jl. Rampai No. 3 A Denpasar
2. PUSKOPWAN Putri Bali, Jl. Cut Nyak Dien Denpasar
3. Koperasi Jasa Kesehatan Insani Bali Medik. Jl. Tukad Balian No. 28 Denpasar.
4. Koperasi HIPMI Bali, Jl. Cok Agung Tresna Denpasar.
5. Koperasi Brata Bhakti, Jl. WR Supratman NO. 12 Denpasar.
6. KSU Astiti Rahayu, Jl. Nangka Utara No. 302 Denpasar.
7. KSU Astiti Sari, Jl. Astasura I No. 39X Denpasar.
8. Koperasi Dana Jaya, Pasar Kidul Jl. Blimbing Nop.3 Bangli
9. KSP Sarining Artha, Perum Graha Luhur Damai Blok E/22 Kediri Tabanan

Selain hal tersebut ada beberapa pengaduan dari masyarakat kepada beberapa koperasi antara lain:

Terhadap pengaduan masyarakat mengenai koperasi yang bermasalah, telah diambil langkah-langkah memanggil koperasi yang bersangkutan dengan mengarahkan untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan yang diadukan oleh masyarakat.

### **3.2.5 BIDANG BINA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

Jumlah anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 1.226.465.000.- dengan realisasi keuangan 95,63% dan realisasi fisik 100% dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

1. Kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah nomor kode rekening 1.15.01.01.15.06 dengan jumlah anggaran Rp.78.328.500.- Tolok ukur dan target kinerja kegiatan :

- Terlaksananya koordinasi pemberdayaan UMKM
- Terlaksananya sosialisasi sumber-sumber pembiayaan UMKM
- Terlaksananya bintek penyusunan rencana usaha
- Terlaksananya konsultasi perencanaan dan pembiayaan bagi UMKM

2. Kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah nomor kode rekening 1.15.01.15.08 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.127.695.000.- Tolok ukur dan target kinerja kegiatan :

- Terlaksananya lomba desain busana produk unggulan daerah
- Terlaksananya koordinasi FKD-MPU
- Terlaksananya monev, penumbuhan wirausaha baru
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung PLUT-KUMKM

3. Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah nomor kode rekening kegiatan 1.15.01.16.03 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.193.675.000.- Tolok ukur dan target kinerja kegiatan :

- Terlaksananya temu kemitraan dalam daerah
  - Terlaksananya temu kemitraan luar daerah
4. Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah nomor kode kegiatan/rekening 1.15.01.17.09 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.476.786.500.- Tolok ukur dan target kinerja kegiatan :
- Terlaksananya promosi produk UMKM ke luar daerah
  - Terlaksananya pameran bersama anggota FKD-MPU

### **3.2.6 UPT DIKLAT KOPERASI**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 40 tahun 2008 tentang tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi UPT adalah sebagai unsure pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dengan kegiatan antara lain :

#### **1. KETATAUSAHAAN**

##### **A. Kepegawaian**

Jumlah pegawai UPT Diklat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali per 31 Desember 2013 sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai menurut jabatan

1. Struktural : 4 orang

- 2. Fungsional Widyaiswara : 3 orang
- 3. Fungsional Pustakawan : 1 orang
- 4. Staf : 6 orang

b. Jumlah pegawai menurut golongan :

- 1. Golongan IV : 5 orang
- 2. Golongan III : 8 orang
- 3. Golongan II : 1 orang
- 4. Golongan I

: -

c. Jumlah pegawai menurut pendidikan :

- 1. S2 : 2 orang
- 2. S1 : 8 orang
- 3. SLTA : 4 orang

## **B. Keuangan**

Dalam tahun anggaran 2013 UPT Diklat Koperasi dibiayai dari APBD (DPA) dengan rincian sebagai berikut.

### **DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN UPT BERSUMBER DARI DANA APBD TAHUN 2013**

No	Sumber Dana	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)	Ket
----	-------------	------------------	-------------	-----

1.	APBD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Induk dan Perubahan tahun 2013	739.521.000	
		:	67.253.000	
		- Pelayanan administrasi perkantoran	354.780.000	
		- Peningkatan sarana dan prasarana	317.488.000	
		- Pengembangan		

### C. Sarana Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki UPT Diklat

Koperasi, UMKM Provinsi Bali adalah :

- a. Gedung UPT Diklat Koperasi, UMKM dengan luas tanah 2150 M<sup>2</sup>, lantai satu sebagai tempat kegiatan administrasi, ruang kepala UPT, ruang tamu, ruang makan dan dapur, lantai dua sebagai tempat belajar dan ruang perpustakaan.
- b. Asrama terdiri dari satu unit bangunan lantai dua terdiri dari sembilan kamar tidur dengan kapasitas 18 orang.
- c. Sound system
- d. LCD dan Note Book (laptop)
- e. White board

- f. Komputer
- g. Overhead Proyektor (OHP)

**2. PEMBERDAYAAN SDM PENGUSAHA KECIL  
MENENGAH DAN KOPERASI**

Dalam tahun anggaran 2013 UPT Diklat Koperasi menyelenggarakan 3 (tiga) program yang bersumber dari dana APBD, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Sumber dana APBD terdiri dari 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 5 (lima) kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat terdiri dari belanja bahan pakai yaitu : belanja materai, perangko dan benda-benda pos lainnya
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yaitu belanja telepon, belanja air dan belanja listrik.
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor yaitu belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yaitu belanja alat listrik dan belanja listrik.
- e. Penyediaan makan dan minum
- f. Upacara keagamaan

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan gedung kantor
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil menengah terdiri atas 2 kegiatan :
- a. Kegiatan Diklat Manajemen pengelolaan koperasi/KUD berupa penyelenggaraan Diklat bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 6 (enam) angkatan dengan jumlah peserta 150 orang KUKM berupa Diklat Perkoperasian bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi dari 6 angkatan (150 orang). Sebelum pelaksanaan Diklat dilakukan identifikasi kebutuhan diklat untuk mengetahui jenis yang memang dibutuhkan gerakan dan setelah diklat dilakukan monev ke lapangan untuk mengetahui kemanfaatan diklat.
  - b. Kegiatan Pengembangan Pusat Diklat dan Pelatihan SDM KUKM

#### B. Kerjasama dengan pihak lain

Dalam mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada pada UPT Diklat Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, telah diadakan kerjasama dengan instansi terkait maupun instansi lain yang bergerak di bidang pemberdayaan SDM Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah maupun yang lainnya.



Bagi pengguna ruang belajar dan asrama yang ada di UPT dipungut retribusi dengan Peraturan Gubernur Bali tentang Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, sebagai berikut :

**a. Untuk kepentingan diklat dilingkungan Pemerintah**

**Daerah :**

1. Ruang belajar Rp. 100.000/hari
2. Ruang asrama Rp. 25.000/orang/hari

**b. Untuk diluar kepentingan diklat Pemerintah Daerah :**

1. Ruang belajar Rp. 150.000/hari
2. Ruang asrama Rp. 40.000/orang/hari

Dalam tahun anggaran 2013 ( per 31 Desember 2013 ), penerimaan retribusi asrama dan ruang belajar sebesar Rp. 29.840.000.- dari target sebesar Rp. 69.900.000.-

**C. Realisasi Kegiatan**

N o	Kegiatan	Jml dana Rp.	Realisasi Rp.	Prosentase (%)	Fisik (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	67.253.000	56.978.586	84,72	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	354.780.000	344.842.750	97,19	100
3	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	317.230.050	311.230.500	97,87	100

	Kompetitif UKM				
--	-------------------	--	--	--	--

g. Kendala dan Hambatan

1. Sumberdaya manusia masih terbatas akibat dari terjadinya mutasi serta pensiun, sehingga perlu adaptasi kembali terhadap pembinaan Koperasi dan UMKM.
2. Jabatan Eselon IV dan III terlalu lama dikosongkan sehingga pekerjaan masih dirangkap oleh pejabat pelaksana.
3. Secara umum kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tidak ada permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan.
4. Untuk di UPT Diklat kapasitas asrama yang ada saat ini masih sangat terbatas dan hanya bisa menampung 18 orang, sedangkan jumlah peserta diklat per angkatan adalah 25 orang, demikian juga tempat parkir masih perlu penataan.
5. Sering terjadi gangguan listrik PLN, sehingga cukup mengganggu operasional peralatan yang menggunakan tenaga listrik dan proses belajar mengajar.
6. Peserta diklat yang dikirim tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat pemanggilan peserta, sehingga tujuan dan sasaran diklat tidak optimal.

h. Solusi

1. Pengisian jabatan kosong baik eselon IV maupun eselon III agar beban kerja tidak bertumpu pada pejabat pelaksana.

2. Perlu diusulkan pembangunan satu unit asrama berlantai dua, lantai dua dapat digunakan untuk ruang tidur sedangkan dilantai satu dapat digunakan untuk tempat parker dan ruang penjaga malam.
3. Perlu diusulkan pengadaan genset sehingga memperlancar kegiatan belajar mengajar.
4. Perlu adanya koordinasi dengan Kabupaten/Kota sehingga sasaran peserta lebih optimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 SIMPULAN**

1. Sasaran pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kemitraan UKM dan Koperasi dengan Pengusaha Besar, BUMD dan BUMN.
2. Program pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2013 dengan dukungan dana APBD Provinsi Bali, meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pengembangan lembaga keuangan. Dengan capaian realisasi keuangan Rp.94,96% dan capaian fisik 100%.
3. Jumlah Pengusaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2013 sebanyak 262.037 unit terdiri dari Sektor Perdagangan sebanyak 117.227 unit, sector industry pertanian 75.779 Unit, sector industry non pertanian 41.517 unit, dan sector aneka jasa sebanyak 27.514 Unit.
4. Jumlah Koperasi posisi 31 Desember 2013 sebanyak 4.654. unit, dengan anggota sebanyak 866.858 orang, asset Rp. 5.705.843.950.553, modal sendiri Rp.1.577.949.242.403., modal luar Rp.3.738.270.510.423, penyerapan tenaga kerja tahun 2013 sebagai manajer sebanyak 1.358 orang, serta karyawan sebanyak 20.244 orang.

#### **4.2 SARAN**

Keberhasilan pemberdayaan terhadap UMKM sangat ditentukan adanya kerjasama yang baik dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang di dukung adanya komitmen yang berkesinambungan.

